

# Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Di Provinsi Sumatera Selatan

*By app. ithenticate.*



## PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :

Dr.rer.med.H. <sup>6</sup> Hamzah Hasyim, S.K.M.,M.K.M.

Dr.Misnaniarti, S.K.M.,M.K.M.

Dr.Nur Alam Fajar, M.Kes.AIFO.

Fatmalina Febry, S.K.M.,M.Si.

Fenny Etrawati, S.K.M.,M.K.M.

Widya Lionita, S.K.M.,M.P.H.

Annisa Rahmawaty, S.K.M.,M.K.M.

Muhammad Amin Arigo Saci, S.K.M.,M.K.M.

Yeni, S.K.M.,M.K.M.

Indah Yuliana, S.Gz.,M.Si.

Rahmatillah Razak, S.K.M.,M.Epid.

Windi Indah Fajar Ningsih, S.Gz.,M.P.H.

Anggun Budiastuti, S.K.M.,M.Epid.

Laura Dwi Pratiwi, S.K.M.,M.K.M.

Nely Murniati,S.P.,M.Si

Nenny Wahyuni,S.P.,M.Si

Susyani, S.Si.T.,M.Kes

dr.Delia Yusfarani, M.Kes

Muhammad Nizar, M.Si

Dr.Yentri Anggeraini, S.Pd.,M.Pd



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Melalui program *matching fund* dalam platform kedaireka, Perguruan Tinggi menawarkan Inovasi solusi berbasis ilmu dan teknologi yang relevan sebagai solusi terbaik penurunan stunting nasional. Inovasi rekacipta yang ditawarkan dapat menjadi landasan kunci penanggulangan stunting terintegrasi yang mencerminkan lima pilar strategi nasional : Pilar 1 dan 3, Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan serta Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa**; **Pilar 2: Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat**; **Pilar 4: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, Keluarga dan Masyarakat**; **Pilar 5: Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset dan Inovasi (Manajemen Data)**. Kegiatan ini dilakukan di 8 kabupaten/kota yang menjadi sasaran program. Luaran (*output*) dari kegiatan ini adalah identifikasi analisis situasi dan permasalahan serta rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi para pemegang kebijakan dalam pencegahan dan percepatan penanggulangan stunting.

## PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia saat ini yang menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Stunting menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak balita terhambat yang dikenali dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, **proporsi stunting pada balita mengalami peningkatan dari 19,3% pada tahun 2016 menjadi 22,8% pada tahun 2017 dan 2018**. Berdasarkan Perpres RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, **percepatan penurunan prevalensi stunting memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara dunia pendidikan, kelembagaan, pemerintah pusat dan daerah (PerpresRI, 2021)**. Selain itu, berdasarkan Peraturan BKKBN Nasional RI No. 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 diperlukan penyusunan rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting dengan kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

## PERMASALAHAN DI SUMATERA SELATAN

1. Penggunaan dana desa yang belum maksimal
  - A. Pengetahuan Kades masih rendah dalam memanfaatkan Dana Desa minimal 20% untuk ketahanan pangan dan hewani dalam menunjang kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah seperti pembelian makanan tambahan, vitamin, atau pengadaan peralatan yang diperlukan seperti timbangan berat badan, *microtoise* dan lain sebagainya.
  - B. Kelurahan tidak memiliki sumber dana seperti dana desa dalam pencegahan dan penanggulangan stunting sehingga lebih banyak menggunakan swadana masyarakat.
2. Pemerintah belum maksimal dalam mendukung program pencegahan dan penurunan stunting.
  - A. Tidak ada sinkronisasi terkait aturan usia pernikahan baik dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) maupun Kementerian Agama
  - B. Pemerintah daerah masih fokus pada intervensi spesifik dibandingkan intervensi sensitif.
  - C. Permasalahan pendataan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah yang masih banyak belum tepat sasaran.
  - D. Belum ada regulasi terkait pencegahan stunting di tingkat Provinsi Sumsel melalui lima pilar baik berupa Perda atau peraturan lainnya.
  - E. Regulasi mengenai pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang ada di 17 Kabupaten / Kota belum ditindaklanjuti oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Kader Posyandu, Kader Gizi, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan ujung tombak dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di setiap desa/kelurahan.
  - A. Masa kerja serta tata cara pemilihan dan pemberhentian para kader belum diatur dalam Peraturan Daerah, kader masih dipengaruhi oleh kepentingan Kepala Desa/Lurah.
  - B. Masih banyak kader dan tim pendamping keluarga yang merangkap jabatan sehingga masih tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
  - C. Belum ada regulasi yang mengatur tentang standar honorarium kader setiap bulannya.
  - D. Pertanggungjawaban kinerja kader belum dikoordinasikan secara berjenjang ditingkat Pemerintah Daerah.
  - E. Masih ada balita yang tercatat di posyandu tetapi tidak sesuai dengan domisili sehingga bisa menjadi masalah utama bias data stunting.
  - F. Kader Pembangunan Manusia belum tersedia di semua kabupaten dan kota.

4. Peran masyarakat yang belum maksimal dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah
  - A. Pengetahuan perangkat daerah dan masyarakat terkait stunting masih banyak yang keliru
  - B. Masyarakat yang bukan merupakan sasaran dalam pencegahan stunting berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan
  - C. Pengetahuan dan pola asuh ibu remaja yang terkait pencegahan pernikahan dini masih sangat rendah sehingga angka pernikahan dini masih tinggi dan anak yang dilahirkan tidak mendapatkan pola asuh yang baik
5. Masih ada Kabupaten / Kota yang belum melibatkan Perguruan Tinggi dalam program pencegahan stunting.

### REKOMENDASI STRATEGI

1. Perlu memaksimalkan penggunaan dana desa
  - A. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan komitmen kades dalam memanfaatkan Dana Desa minimal 20% untuk ketahanan pangan dan hewani dalam menunjang kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah seperti pembelian makanan tambahan, vitamin, atau pengadaan peralatan yang diperlukan seperti timbangan Berat Badan, *microtoise* dan lain sebagainya.
  - B. Perlu dilakukan literasi stunting berdasarkan kearifan lokal
  - C. Perlu adanya sumber dana di tingkat kelurahan seperti dana desa dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting sehingga lebih banyak menggunakan swadana masyarakat.
2. Perlu Komitmen dari pemerintah untuk mendukung program pencegahan dan percepatan penurunan stunting
  - A. Perlu adanya sinkronisasi terkait aturan usia pernikahan baik dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) maupun Kementerian Agama.
  - B. Pemerintah Daerah harus fokus pada intervensi sensitif dan juga intervensi spesifik.
  - C. Perlu adanya sistem pencatatan dan pendataan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah sehingga dapat tepat sasaran.
  - D. Perlu adanya regulasi terkait pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi Sumsel melalui lima pilar baik berupa Peraturan daerah maupun peraturan lainnya yang dikaitkan dengan 8 Aksi Konvergensi Stunting
  - E. Perlu adanya tindaklanjut dari regulasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang ada di 17 Kab/Kota oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3. Kader posyandu, kader gizi, dan kader pembangunan manusia (KPM) desa merupakan ujung tombak dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di setiap desa masih perlu mendapatkan perhatian.
  - A. Perlu adanya regulasi untuk mengatur masa kerja serta tata cara pemilihan dan pemberhentian para kader dalam Peraturan Daerah, dikarenakan kader masih dipengaruhi oleh kepentingan Kepala Desa/Lurah.
  - B. Perlu adanya regulasi pembagian kerja yang jelas agar kader tidak merangkap jabatan sehingga tugas kader tidak tumpang tindih dengan program lainnya.
  - C. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang standar honorarium kader setiap bulannya.
  - D. Perlu adanya mekanisme yang jelas terkait pertanggungjawaban kinerja kader yang dikoordinasikan secara berjenjang ditingkat Pemerintah Daerah.
  - E. Perlu adanya sistem pencatatan yang baik agar balita yang tercatat di posyandu sesuai dengan domisili sehingga bisa menjadi penanggulan dalam masalah bias data stunting.
  - F. Perlu adanya pembentukan atau penunjukkan Kader KPM di semua kabupaten dan kota.
4. Perlu memaksimalkan Peran masyarakat dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah
  - A. Perlu adanya peningkatan pengetahuan perangkat daerah dan masyarakat terkait stunting.
  - B. Perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bantuan untuk keluarga dengan anak stunting ataupun beresiko stunting.
  - C. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pola asuh ibu terkait pencegahan pernikahan dini pada remaja sehingga angka pernikahan dini berkurang dan anak yang dilahirkan mendapatkan pola asuh yang baik.
5. Perlu adanya keterlibatan dari seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten / Kota dalam program pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

#### KOLABORASI PERGURUAN TINGGI





# Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Di Provinsi Sumatera Selatan

---

ORIGINALITY REPORT

---

11%

SIMILARITY INDEX

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://negerilaskarpelangi.com">negerilaskarpelangi.com</a> Internet	24 words — 2%
2	<a href="https://gizipoltekkesaceh.ac.id">gizipoltekkesaceh.ac.id</a> Internet	22 words — 2%
3	<a href="https://www.sonora.id">www.sonora.id</a> Internet	20 words — 2%
4	Alvin Rodolf Diaz, Febriyanti Ramadhani. "HUBUNGAN SANITASI DASAR DAN RIWAYAT PENYAKIT INFEKSI DIARE PENYEBAB STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JERUSU DESA JERUSU KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA", Molucca Medica, 2022 Crossref	17 words — 1%
5	<a href="https://monalisa.bkkbn.go.id">monalisa.bkkbn.go.id</a> Internet	14 words — 1%
6	<a href="https://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet	13 words — 1%
7	St. Malka, Musni Musni, Sitti Fatimah. "FAKTOR KEHAMILAN DINI, ANTENATAL CARE, ASI EKSKLUSIF DAN PENGETAHUAN GIZI TERHADAP STUNTING	12 words — 1%

PADA BALITA RESIKO STUNTING PADA BALITA DI KABUPATEN BONE", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2021

Crossref

---

8	<a href="http://lppm.unsri.ac.id">lppm.unsri.ac.id</a> Internet	11 words — 1%
9	<a href="http://tes.borneonews.co.id">tes.borneonews.co.id</a> Internet	11 words — 1%

---

EXCLUDE QUOTES ON  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF  
EXCLUDE MATCHES < 11 WORDS